

► PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## Peserta Membeludak, Sosialisasi BPK Ricuh

KLATEN—Acara sosialisasi yang diadakan Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) di Kabupaten Klaten, Jumat (14/3) ricuh. Pasalnya, ada ribuan perangkat desa se-Soloraya yang datang ke acara tersebut dan diduga membawa undangan palsu.

Dari pantauan *Espos*, acara *Sosialisasi Optimalisasi Pengawasan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah* itu hanya berupa diskusi terbatas. Kegiatan itu menghadirkan beberapa narasumber yakni Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Hatta; Perwakilan BPK, Bahrullah Akbar; dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Hendriwan.

Namun, kenyataan di lapangan, jumlah peserta dalam acara tersebut mencapai ribuan orang sehingga tidak sesuai kapasitas *ballroom* Hotel Grand Tjokro, Klaten yang hanya sekitar seribuan orang. Hal itu membuat ratusan peserta duduk di luar *ballroom*, dan ada yang berada di halaman hotel. Bahkan, di dalam *ballroom* ada yang berdiri karena tidak mendapat tempat duduk.

Saat acara dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, bahkan ada salah satu peserta dari puluhan peserta yang berdiri, menyeletuk karena tidak mendapat tempat duduk.

*"Kene ki perangkat desa tapi ya diuwongke. Hla diundang kok kaya ngene [Kita ini perangkat desa yang harus dihormati. Hla diundang kok seperti ini],"* kata salah satu peserta dengan yang berdiri di barisan di dekat pintu masuk *ballroom* hotel.

Beberapa peserta lainnya bahkan ada yang memilih pulang karena kecewa tidak dapat tempat duduk. *"Wis, mulih wae. Lha ra entuk lungguhan,"* kata dia. Tapi, ada juga peserta yang masih bersabar menunggu acara tersebut dan duduk lesehan di depan pintu *ballroom*. Sementara itu, di halaman Hotel

Grand Tjokro Klaten, belasan peserta protes kepada panitia karena tidak mendapat tempat duduk. Mereka yang merasa mendapat undangan, merasa tidak dinggap karena jumlah peserta membeludak.

Sementara itu, seorang perwakilan panitia penyelenggara yang menyatakan sebagai salah satu pejabat humas BPK, mengatakan tidak pernah mengirimkan undangan ke perangkat desa. Undangan tersebut hanya ditujukan ke camat, lurah atau kepala desa melalui Bupati atau Wali Kota se-Soloraya. (Ayu Abriyani K.P.)